PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBe) "BESEK BERDAYA" DI DESA REJOAGUNG, KECAMATAN SRONO, KABUPATEN BANYUWANGI

Atho'ilah Aly Najamudin[1*], Ainur Rofiq[2], Syamsul Arifin[3], Ahmad Rudi Maswanto[4] Ahmad Aulia' Maqbul [5], Indra Agustian[6] Elis Apriliyah[7]

[1,2,3] Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi
[4,6] Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi
[5] Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi
[7] Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi

e-mail: athoilahnajamudin19@gmail.com

ABSTRAK

Potensi ekonomi masyarakat perdesaan tidak selalu berkembang secara optimal ketika aktivitas produksi belum didukung oleh kelembagaan usaha kolektif. Kondisi tersebut ditemukan pada komunitas pengrajin besek bambu di Dusun Sumberagung Kidul, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendampingi pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) sebagai upaya memperkuat kapasitas organisasi dan mengembangkan kerja sama ekonomi masyarakat. Pengabdian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan prinsip *Participatory Action Research* (PAR). Pelaksanaan kegiatan meliputi pemetaan partisipatif, validasi lapangan secara *door-to-door*, pendekatan sosial kepada tokoh masyarakat dan calon anggota, rekrutmen, musyawarah pembentukan kelompok, serta konsolidasi administrasi kelembagaan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sekitar 60% rumah tangga di Dusun Sumberagung Kidul terlibat dalam kerajinan besek bambu, sehingga menjadi potensi ekonomi lokal yang relevan untuk dikembangkan melalui pengorganisasian kolektif. Pendampingan menghasilkan terbentuknya KUBe "Besek Berdaya" dengan 30 anggota, struktur kepengurusan, tiga divisi operasional yang meliputi produksi dan *quality control*, pemasaran dan kemitraan, serta pengembangan usaha dan pelatihan. Kelompok juga berhasil menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta memperoleh pengakuan administratif-sosial pada tingkat dusun dan desa. Temuan ini menegaskan bahwa pembentukan kelembagaan berbasis partisipasi merupakan langkah awal dalam menghubungkan potensi ekonomi lokal dengan kapasitas usaha kolektif. Keberlanjutan kelompok memerlukan penguatan tata kelola, legalitas formal, pencatatan produksi dan keuangan, serta pengembangan jaringan pemasaran.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat; Kelompok Usaha Bersama; besek bambu; kelembagaan ekonomi; *Participatory Action Research*.

ABSTRACT

Rural craft communities may possess established production skills and strong social networks, yet their economic activities can remain fragmented in the absence of collective business institutions. This article documents and analyzes the facilitation process involved in establishing the Joint Business Group (Kelompok Usaha Bersama/KUBe) "Besek Berdaya" in Sumberagung Kidul Hamlet, Rejoagung Village, Srono District, Banyuwangi Regency, Indonesia. The community engagement program employed a descriptive qualitative approach informed by the participatory principles of Participatory Action Research (PAR). Data were collected through participatory mapping, door-to-door field validation, discussions with community leaders and prospective members, consensus-based deliberations, and a review of activity documents. The intervention was conducted from 27 July to 3 August 2026, followed by administrative consolidation through 5 August 2026. The verified outputs included the establishment of KUBe "Besek Berdaya" with 30 registered members, an organizational management structure, three operational divisions, and written organizational guidelines in the form of Articles of Association and Bylaws (AD/ART). The group also received administrative and social recognition at the hamlet and village levels. This

article does not claim improvements in income, business turnover, or production volume, as longitudinal economic data are not yet available. Its contribution lies in formulating a practical, institution-building model based on participatory mapping, the development of local legitimacy, targeted member recruitment, deliberative organizational formation, and administrative consolidation. The sustainability of the group will require formal legal recognition, regular organizational governance, production and financial record-keeping, market expansion, and continued facilitation.

Keywords: *community empowerment; joint business group; bamboo besek craft; rural entrepreneurship; participatory action research.*

Pendahuluan

Pemberdayaan ekonomi perdesaan merupakan proses penguatan kapasitas masyarakat dalam mengenali, mengelola, dan mengembangkan sumber daya lokal secara mandiri. Dalam perspektif pembangunan endogen, keberhasilan pengembangan ekonomi lokal tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam dan keterampilan produksi, tetapi juga oleh kapasitas masyarakat dalam membangun kerja sama, mengorganisasikan kegiatan ekonomi, dan mengelola sumber daya secara kolektif. Fenomena tersebut ditemukan pada aktivitas kerajinan besek bambu di Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan hasil pemetaan dan validasi lapangan pada tanggal 12–15 Juni 2026, sekitar 60% warga Dusun Sumberagung Kidul terlibat dalam aktivitas menganyam besek bambu, sementara sekitar 35% populasi Desa Rejoagung memiliki keterkaitan dengan sektor usaha tersebut. Persoalan tersebut menjadi krusial karena terdapat kesenjangan antara besarnya potensi ekonomi masyarakat dan kemampuan kolektif untuk mengelolanya. Penelitian dan program pemberdayaan pengrajin bambu menunjukkan bahwa penguatan keterampilan produksi perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas pengelolaan usaha, inovasi produk, dan pemasaran. Sementara itu, kajian ini menunjukkan bahwa pendampingan pengrajin bambu melalui pendekatan partisipatif dapat mendorong pengembangan produk dan pemasaran digital. (Aritenang, 2021; Najamudin, A. I. A., Istain, K., Handayani, A. N., Umara, A. A., Hanifah, G. A., Mutsana, M. I., ... & Barkah, S., 2019; Pramesti dkk., 2022). Kondisi ini menegaskan pentingnya pendampingan pembentukan kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat.

Penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi berbasis kerajinan bambu telah berkembang dalam beberapa arah. Pertama, penelitian yang menekankan peningkatan keterampilan produksi dan pengembangan produk misalnya, mengkaji desain dan pelatihan produk bambu sebagai upaya pemberdayaan kampung kreatif (Wiradarmo dkk., 2022). Kedua, penelitian yang berorientasi pada penguatan pemasaran dan akses pasar. menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) melalui sosialisasi,

diskusi kelompok, pelatihan, dan pendampingan untuk mengembangkan produk serta pemasaran digital kerajinan bambu (Pramesti dkk., 2022). Ketiga, penelitian yang menghubungkan pemberdayaan pengrajin dengan pengembangan kapasitas kewirausahaan bahwa pelatihan anyaman bambu, perencanaan usaha, dan pemasaran digital dapat meningkatkan kapasitas masyarakat serta mendorong terbentuknya kelompok usaha baru (Effendi dkk., 2025). Sementara itu, penelitian (Sumiati dkk., 2024) secara lebih spesifik membahas pemberdayaan masyarakat pengrajin besek bambu melalui pengembangan kreasi produk. Dengan demikian, kesenjangan penelitian ini terletak pada belum memadainya penjelasan mengenai proses sosial dan organisatoris yang mengubah potensi ekonomi individual menjadi kelembagaan usaha kolektif yang dibangun dan disepakati oleh masyarakat sendiri.

Berdasarkan fenomena empiris dan kesenjangan penelitian terdahulu, kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis proses pendampingan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Besek Berdaya di Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menjelaskan bagaimana potensi ekonomi lokal diidentifikasi sebagai dasar pembentukan kelompok usaha, bagaimana calon anggota dilibatkan dalam proses pengorganisasian, bagaimana kesepahaman dan kepercayaan dibangun melalui interaksi dan musyawarah, serta bagaimana struktur organisasi, pembagian peran, dan kesepakatan kerja dirumuskan secara partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan partisipatif digunakan dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses identifikasi masalah, penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, dan pembentukan kelembagaan. Pendekatan ini memungkinkan proses pemberdayaan tidak hanya menghasilkan organisasi secara formal, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk membangun rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kelompok yang dibentuk. Sejalan dengan (Putri dkk., 2026), pendekatan PAR dapat digunakan untuk mengintegrasikan proses pembelajaran, keterlibatan masyarakat, dan tindakan pemberdayaan dalam konteks perdesaan. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini diharapkan tidak berhenti pada dokumentasi kegiatan pendampingan, tetapi memberikan pemahaman mengenai mekanisme pembentukan kelembagaan ekonomi berbasis partisipasi masyarakat.

Penelitian ini berargumen bahwa pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Besek Berdaya tidak cukup dilakukan melalui penetapan struktur kepengurusan dan pembentukan kelompok secara administratif. Pembentukan kelembagaan ekonomi membutuhkan proses sosial yang melibatkan pengenalan potensi lokal, pelibatan calon anggota, pembangunan kepercayaan, musyawarah, serta perumusan kesepakatan dan

aturan organisasi. Proses tersebut menjadi penting karena masyarakat yang sebelumnya menjalankan aktivitas produksi secara individual tidak secara otomatis memiliki kesamaan kepentingan, kesiapan bekerja sama, dan komitmen untuk mengelola usaha secara kolektif. Temuan (Effendi dkk., 2025) mengenai munculnya kelompok usaha melalui kegiatan pemberdayaan pengrajin bambu serta kajian (Sosmiarti dkk., 2026) mengenai penguatan kelembagaan berbasis partisipasi memberikan dukungan empiris terhadap pentingnya proses pengorganisasian tersebut. Dengan demikian, pembentukan KUBe Besek Berdaya dipahami sebagai proses transformasi sosial-organisatoris, yaitu perubahan dari aktivitas ekonomi individual yang tersebar menuju kegiatan usaha yang lebih terkoordinasi melalui kelembagaan kolektif.

Metode Pelaksanaan

1. Pendekatan dan Desain Pengabdian

Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma partisipatif yang mengadopsi prinsip *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses identifikasi masalah, pengumpulan informasi, pengambilan keputusan, pelaksanaan tindakan, serta refleksi dan evaluasi terhadap hasil tindakan (Hove dkk., 2023; Khaerul dkk., 2022; Ku, 2022; RI, 2022). Dalam pendekatan ini, tim pengabdian berperan sebagai fasilitator yang membantu proses pengorganisasian masyarakat, sedangkan masyarakat berperan sebagai sumber pengetahuan sekaligus subjek yang menentukan kebutuhan dan arah tindakan kolektif.

Pendekatan tersebut dipilih karena tujuan pengabdian bukan menguji efektivitas pelatihan melalui desain eksperimental, melainkan memfasilitasi proses pengorganisasian sosial dan pembentukan kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) (RI, 2022). Oleh karena itu, kegiatan difokuskan pada fase inisiasi kelembagaan, mulai dari pemetaan potensi dan persoalan ekonomi masyarakat, identifikasi calon anggota, musyawarah pembentukan kelompok, penyusunan struktur organisasi, hingga perumusan kesepakatan tata kelola kelompok.

2. Lokasi dan Subjek Pengabdian

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Dusun Sumberagung Kidul, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil observasi awal pada tanggal 12-15 Juni 2026 yang menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas kerajinan besek berbahan dasar bambu. Aktivitas tersebut

merupakan potensi ekonomi lokal yang memiliki peluang untuk dikembangkan melalui pengorganisasian usaha secara kolektif.

Pemetaan awal dilakukan terhadap 97 kepala keluarga (KK) sebagai unit rumah tangga untuk memperoleh gambaran mengenai potensi ekonomi, keterlibatan masyarakat dalam aktivitas kerajinan besek, hambatan usaha, serta modal sosial yang tersedia. Angka 97 KK tersebut menjadi basis pemetaan pada tingkat dusun dan selanjutnya diperdalam melalui kunjungan langsung kepada rumah tangga. Dengan demikian, pemetaan tidak hanya diarahkan untuk mengidentifikasi jumlah pengrajin, tetapi juga memahami kondisi sosial yang memengaruhi kemungkinan pembentukan kelompok usaha.

Pemetaan awal di Dusun Sumberagung Kidul dilakukan terhadap 97 kepala keluarga (KK) berdasarkan data rumah tangga yang dihimpun oleh tim pengabdian. Pemetaan ini merupakan kegiatan tersendiri yang difokuskan pada identifikasi potensi ekonomi, keterlibatan rumah tangga dalam kerajinan besek bambu, hambatan pengembangan usaha, dan modal sosial masyarakat. Data hasil pemetaan selanjutnya digunakan sebagai dasar identifikasi calon anggota dan perencanaan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBe).

3. Tahapan Pelaksanaan PAR

Pelaksanaan pengabdian mengikuti prinsip siklus PAR yang dioperasionalkan melalui lima tahapan, yaitu identifikasi masalah dan pemetaan partisipatif, validasi informasi, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan kolektif, serta refleksi dan evaluasi partisipatif (Hove dkk., 2023)**.** Pertama, identifikasi masalah dan pemetaan partisipatif. Tahap ini dilakukan melalui observasi lapangan dan pemetaan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Tim pengabdian bersama masyarakat mengidentifikasi sebaran aktivitas kerajinan besek, keterlibatan rumah tangga, potensi sumber daya lokal, hambatan pengembangan usaha, serta bentuk kerja sama yang telah berlangsung. Pemetaan dilakukan dengan menggunakan lembar identifikasi rumah tangga dan panduan observasi yang memuat informasi mengenai keterlibatan dalam UMKM, aktivitas produksi besek, potensi ekonomi, persoalan usaha, dan modal sosial masyarakat. Hasil pemetaan digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan pengorganisasian usaha bersama.

Kedua, validasi informasi melalui kunjungan *door-to-door*. Informasi hasil pemetaan awal diperiksa kembali melalui kunjungan langsung kepada rumah tangga. Validasi diarahkan pada kesesuaian informasi mengenai keterlibatan warga dalam kerajinan besek, aktivitas produksi, pengalaman menjalankan usaha, hambatan yang

dihadapi, serta kesediaan untuk terlibat dalam kelompok usaha. Informasi yang diperoleh dicatat dalam lembar validasi rumah tangga untuk membandingkan temuan awal dengan keterangan langsung dari warga. Proses ini dilakukan agar keputusan pembentukan kelompok tidak hanya didasarkan pada asumsi tim pengabdian, tetapi mempertimbangkan kondisi dan kesediaan masyarakat.

Ketiga, perencanaan tindakan melalui dialog dan musyawarah. Hasil pemetaan dan validasi menjadi bahan diskusi bersama tokoh masyarakat dan calon anggota. Dialog diarahkan untuk membahas kebutuhan pembentukan kelompok, tujuan kelembagaan, manfaat kerja sama, pembagian peran, serta mekanisme pengelolaan kelompok. Dalam tahap ini, tim pengabdian memberikan fasilitasi dan penjelasan mengenai alternatif pengorganisasian, sedangkan keputusan mengenai pembentukan kelompok dan susunan kepengurusan dibahas serta disepakati melalui musyawarah bersama masyarakat.

Keempat, pelaksanaan tindakan kolektif. Tindakan diwujudkan melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBe), penetapan keanggotaan, pemilihan pengurus, penyusunan struktur organisasi, serta perumusan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Proses tersebut didokumentasikan melalui Berita Acara Pembentukan, Lembaran Pengesahan, daftar anggota, daftar pengurus, dan dokumen AD/ART. Dokumen tersebut menjadi bukti konkret bahwa proses partisipatif telah menghasilkan keluaran kelembagaan yang dapat diverifikasi.

Kelima, refleksi dan evaluasi partisipatif. Refleksi dilakukan untuk meninjau kesesuaian antara kebutuhan yang teridentifikasi, keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah, dan kelembagaan yang berhasil dibentuk. Evaluasi diarahkan pada keterwakilan anggota, kejelasan pembagian tugas, kesepakatan tata kelola, serta kesiapan kelompok menjalankan aktivitas secara kolektif. Hasil refleksi digunakan untuk mengidentifikasi aspek yang masih membutuhkan penguatan, terutama konsolidasi keanggotaan, administrasi organisasi, dan agenda pengembangan usaha berikutnya. Dengan demikian, evaluasi tidak diarahkan untuk mengukur dampak ekonomi jangka panjang, melainkan menilai kesiapan kelembagaan pada fase awal pembentukan.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data pengabdian diperoleh melalui beberapa teknik berikut :

1. Observasi partisipatif dan pemetaan lapangan. Dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi sosial-ekonomi, sebaran pengrajin besek, aktivitas produksi, potensi lokal, dan pola hubungan sosial masyarakat. Instrumen yang digunakan berupa lembar observasi dan lembar pemetaan rumah tangga.

2. Validasi *door-to-door*. Dilakukan melalui kunjungan langsung kepada rumah tangga untuk memeriksa keterlibatan dalam kerajinan besek, pengalaman usaha, hambatan yang dihadapi, dan kesediaan menjadi anggota kelompok. Hasil kunjungan dicatat dalam lembar validasi rumah tangga.
3. Dialog dan musyawarah partisipatif. Dilakukan bersama tokoh masyarakat dan calon anggota untuk mengidentifikasi kebutuhan, membahas alternatif pembentukan kelompok, menentukan struktur organisasi, serta menyepakati mekanisme pengelolaan KUBe. Hasil pembahasan dicatat dalam catatan kegiatan dan dituangkan dalam dokumen kesepakatan organisasi.
4. Telaah dokumen primer. Dilakukan terhadap dokumen pembentukan KUBe, meliputi Berita Acara Pembentukan, Lembaran Pengesahan, daftar anggota, daftar pengurus, serta AD/ART. Dokumen tersebut digunakan untuk memverifikasi keluaran kelembagaan yang dihasilkan melalui proses pengorganisasian masyarakat.

5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui empat tahapan yang saling berkaitan. Pertama, reduksi data, yaitu menyeleksi dan memusatkan informasi dari hasil observasi, pemetaan rumah tangga, validasi *door-to-door*, dialog, dan dokumen kelembagaan berdasarkan relevansinya dengan tujuan pengabdian. Informasi yang tidak berkaitan langsung dengan proses pembentukan KUBe tidak dijadikan fokus analisis.

Kedua, kategorisasi data, yaitu mengelompokkan informasi ke dalam kategori tematik, meliputi potensi ekonomi lokal, keterlibatan rumah tangga dalam kerajinan besek, hambatan pengembangan usaha, modal sosial, partisipasi masyarakat, proses pengambilan keputusan, dan capaian kelembagaan. Pengelompokan ini digunakan untuk membaca hubungan antara kondisi awal masyarakat dan kebutuhan pembentukan organisasi usaha.

Ketiga, penyajian data, yaitu menyusun hasil analisis dalam bentuk uraian deskriptif, matriks tematik, dan dokumentasi kelembagaan. Penyajian dilakukan dengan membandingkan kondisi awal, hasil validasi, proses musyawarah, tindakan kolektif, dan keluaran organisasi. Keempat, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menginterpretasikan keterkaitan antartemuan untuk menilai sejauh mana proses partisipatif menghasilkan kapasitas kelembagaan awal. Kesimpulan diperiksa kembali melalui kesesuaian antara catatan lapangan, keterangan masyarakat, dan dokumen pembentukan KUBe.

6. Batasan Klaim dan Indikator Keberhasilan

Kegiatan utama dilaksanakan pada 27 Juli–3 Agustus 2026, sedangkan konsolidasi administratif berlangsung hingga 18 Agustus 2026. Durasi kegiatan secara sengaja dibatasi pada fase inisiasi dan pengorganisasian sosial. Oleh karena itu, indikator keberhasilan difokuskan pada keluaran dan kapasitas kelembagaan awal yang dapat diverifikasi melalui dokumen pembentukan, keanggotaan, struktur kepengurusan, dan kesepakatan tata kelola kelompok. Analisis juga mempertimbangkan *outcome* awal yang teramati, seperti keterlibatan masyarakat dalam musyawarah, kesepakatan pembentukan kelompok, dan kesiapan menjalankan organisasi. Namun, klaim mengenai peningkatan pendapatan, omzet, volume produksi, produktivitas, dan kesejahteraan belum diajukan karena belum tersedia data longitudinal sebelum dan sesudah intervensi. Pembatasan ini penting karena perubahan ekonomi dan keberlanjutan usaha perdesaan membutuhkan proses yang lebih panjang daripada satu fase pembentukan organisasi.



Gambar 1. Pemetaan PAR Desa Rejoagung dan modal lokal (sumber: data primer pemetaan tim KKN, 2026).

Hasil dan Pembahasan

1. Pemetaan Partisipatif sebagai Dasar Penentuan Fokus Intervensi

Hasil Pemetaan partisipatif dilakukan untuk mengidentifikasi potensi ekonomi, kapasitas sosial, dan kebutuhan pengorganisasian masyarakat di Dusun Sumberagung Kidul. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa sekitar 60% rumah tangga yang menjadi unit

pemetaan di dusun tersebut terlibat dalam kegiatan kerajinan besek bambu, sedangkan pada tingkat Desa Rejoagung keterlibatan masyarakat dalam sektor tersebut mencapai sekitar 35%. Data ini menunjukkan bahwa kerajinan besek bukan sekadar kegiatan ekonomi individual, melainkan telah menjadi bagian dari mata pencaharian masyarakat dan memiliki basis pelaku yang cukup luas untuk dikembangkan secara kolektif.

Temuan tersebut sejalan dengan kajian mengenai *bamboo enterprise* di Indonesia yang menunjukkan bahwa usaha berbasis bambu dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat, meskipun pengembangan rantai nilai dan hubungan antaraktor usaha masih menghadapi sejumlah kendala (Muttaqin dkk., 2023) Dengan demikian, pemetaan tidak diarahkan untuk mengasumsikan bahwa masyarakat belum memiliki keterampilan produksi, tetapi untuk memahami kapasitas yang telah berkembang serta hambatan yang membatasi penguatan usaha. Dalam konteks Sumberagung Kidul, persoalan yang perlu mendapat perhatian bukan hanya kemampuan menganyam, melainkan juga koordinasi antarperajin, pembagian kerja, posisi tawar, dan akses terhadap pasar.

Selain potensi kerajinan besek, pemetaan juga mengidentifikasi modal sosial gotong royong sebesar 71,4%, menunjukkan keterlibatan dalam kegiatan gotong royong. Indikator tersebut dapat berupa keterlibatan dalam kerja bersama, kesediaan membantu warga lain, partisipasi dalam kegiatan lingkungan, atau bentuk kerja sama lain apabila memang tercantum dalam instrumen pengumpulan data. Angka ini tidak secara otomatis menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki kapasitas bisnis kolektif. Namun, temuan tersebut mengindikasikan adanya modal sosial yang berpotensi menjadi landasan bagi pengembangan kerja sama ekonomi apabila didukung oleh tujuan, pembagian peran, dan aturan organisasi yang disepakati bersama.

Literatur mengenai modal sosial di wilayah perdesaan menempatkan kepercayaan, partisipasi, dan jejaring sebagai sumber daya yang dapat memfasilitasi tindakan ekonomi bersama ketika didukung oleh tujuan dan aturan yang jelas (Aritenang, 2021; Liu dkk., 2023). Oleh karena itu, keterkaitan antara tingginya keterlibatan masyarakat dalam kerajinan besek dan adanya praktik gotong royong menjadi dasar pemilihan intervensi berupa pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBe). Potensi ekonomi menunjukkan adanya kesamaan bidang usaha dan kepentingan di antara para perajin, sedangkan modal sosial menyediakan kemungkinan awal untuk membangun kerja sama. KUBe kemudian diarahkan sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi, menyepakati pembagian peran, membangun tata kelola usaha, dan mengembangkan hubungan pemasaran secara lebih terorganisasi. Dengan demikian, pembentukan KUBe tidak dimaksudkan untuk menggantikan keterampilan produksi yang telah dimiliki masyarakat, melainkan untuk mengorganisasi potensi tersebut ke dalam kerja sama ekonomi yang

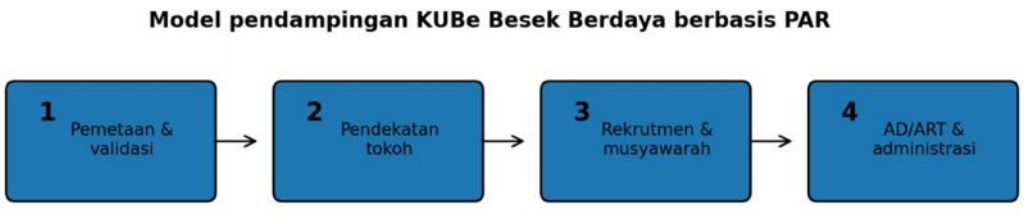
lebih terstruktur. Pilihan intervensi ini juga sejalan dengan temuan bahwa inovasi dan pertumbuhan usaha perdesaan dipengaruhi oleh kualitas jejaring lokal serta kemampuan pelaku usaha menghubungkan kegiatan ekonomi dengan jaringan vertikal dan eksternal.

Tabel 1. Hasil Rapid Assessment Desa Rejoagung sebagai Dasar Penentuan Fokus Intervensi

Indikator	Hasil survei	Sumber data	Interpretasi
Jumlah responden	97 KK	Survei Rejoagung, Juni 2026	Menjadi dasar asesmen awal kondisi sosial desa.
Sampel Dusun Sumberagung Kidul	20 KK (20% dari sampel)	Distribusi sampel survei	Memberikan gambaran awal wilayah, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan persentase seluruh pengrajin besek di dusun.
Potensi UMKM desa	16,98%	Persepsi responden mengenai potensi desa	Menunjukkan adanya pengakuan terhadap sektor usaha produktif sebagai potensi ekonomi lokal.
Kemampuan menyelesaikan masalah bersama	87,85% (63,55% mampu; 24,30% sangat mampu)	Persepsi responden	Mengindikasikan keyakinan masyarakat terhadap kapasitas penyelesaian masalah secara kolektif.
Kesediaan berkontribusi dalam bentuk tenaga	41,81%	Jawaban responden mengenai bentuk keterlibatan	Menunjukkan tenaga sebagai bentuk kontribusi yang paling banyak dipilih.
Partisipasi dalam musyawarah	33,33% sering; 32,38% jarang; 18,10% kadang-kadang; 16,19% tidak pernah	Jawaban responden mengenai keikutsertaan dalam musyawarah	Menunjukkan partisipasi dalam forum warga belum merata sehingga pengorganisasian perlu memperhatikan keterlibatan anggota.

Sumber: Survei *Assessment* Desa Rejoagung, 12–15 Juni 2026. Jumlah responden 97 KK.

2. Strategi Pendampingan: dari Legitimasi Sosial ke Tindakan Kolektif



Gambar 2. Alur pendampingan pembentukan KUBe "Besek Berdaya" berbasis prinsip PAR (diolah dari data primer, 2026)

Strategi pendampingan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) dilaksanakan melalui empat tahap yang saling berkaitan, yaitu pemetaan dan validasi, pendekatan sosial, rekrutmen dan musyawarah, serta konsolidasi administrasi kelembagaan. Tahap pertama dilakukan melalui pemetaan potensi kerajinan besek dan validasi kondisi pengrajin untuk memperoleh gambaran mengenai kapasitas produksi, persoalan usaha, serta kebutuhan pengorganisasian. Pada tahap ini, masyarakat berpartisipasi dengan memberikan informasi mengenai kegiatan usaha dan kondisi yang dihadapi. Hasil pemetaan kemudian menjadi dasar bagi tim pendamping dan masyarakat untuk menentukan fokus intervensi.

Tahap kedua dilakukan melalui pendekatan kepada tokoh masyarakat dan pengrajin yang memiliki pengalaman dalam kegiatan kerajinan besek. Tokoh masyarakat berperan sebagai penghubung antara tim pendamping dan warga, membantu membuka komunikasi, serta memberikan penerimaan sosial terhadap rencana pembentukan kelompok. Sementara itu, pengrajin berpengalaman berperan memberikan pengetahuan mengenai praktik produksi, persoalan usaha, dan kebutuhan kerja sama antarperajin. Keterlibatan keduanya penting karena pembentukan organisasi ekonomi tidak hanya memerlukan kelengkapan administratif, tetapi juga penerimaan dan kepercayaan dari masyarakat yang akan menjadi anggotanya. Meskipun demikian, peran tokoh masyarakat dan pengrajin berpengalaman tidak ditempatkan sebagai penentu tunggal keanggotaan maupun struktur kelompok. Keduanya berfungsi memfasilitasi proses pengenalan dan membangun legitimasi sosial, sedangkan keputusan organisasi tetap dibahas bersama calon anggota.

Tahap ketiga adalah rekrutmen terarah dan musyawarah untuk membentuk kelompok yang beranggotakan 30 orang. Rekrutmen dilakukan dengan mempertimbangkan kesamaan bidang kegiatan, yaitu keterlibatan dalam usaha kerajinan besek bambu, serta komitmen dan kesiapan untuk terlibat dalam kerja kelompok. Dengan kriteria tersebut, keanggotaan tidak semata-mata didasarkan pada kedekatan personal atau jumlah peserta, tetapi diarahkan pada kesesuaian antara aktivitas ekonomi anggota dan tujuan pembentukan KUBe. Jumlah 30 orang dalam kegiatan ini merupakan jumlah anggota yang dihimpun dalam proses pembentukan kelompok, bukan hasil penentuan sampel statistik.

Setelah calon anggota dihimpun, musyawarah dilakukan untuk membahas identitas kelompok, tujuan bersama, struktur kepengurusan, dan pembagian peran. Calon anggota diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan, mengajukan usulan, dan menyepakati susunan organisasi. Proses pengambilan keputusan diarahkan melalui musyawarah mufakat agar struktur yang terbentuk memperoleh penerimaan dari anggota. Dengan demikian, pembentukan KUBe tidak hanya menghasilkan daftar keanggotaan, tetapi juga

menjadi proses awal untuk membangun kesepahaman mengenai tanggung jawab dan mekanisme kerja bersama.

Tahap keempat adalah konsolidasi administrasi dan kelembagaan melalui penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), daftar anggota, struktur kepengurusan, dan dokumen pengesahan. Pada tahap ini, tim pendamping membantu memfasilitasi penyusunan dan penataan dokumen, sedangkan anggota memberikan masukan serta menyepakati isi aturan organisasi. Rangkaian pendampingan tersebut menempatkan tim KKN sebagai fasilitator proses pengorganisasian, bukan sebagai pihak yang menentukan bentuk organisasi secara sepihak. Hasil akhirnya adalah terbentuknya KUBe sebagai wadah awal untuk mengembangkan kerja sama ekonomi para pengrajin besek bambu.

Pendekatan melalui tokoh masyarakat dan pengrajin berpengalaman relevan dengan temuan bahwa keterlekatan sosial (*social embeddedness*) dan koneksi lokal memengaruhi aktivitas kewirausahaan perdesaan (Aritenang, 2021; Najamudin, A. I. A., Istain, K., Handayani, A. N., Umara, A. A., Hanifah, G. A., Mutsana, M. I., ... & Barkah, S., 2019). Namun, legitimasi sosial yang dibangun melalui tokoh lokal perlu diikuti oleh keterlibatan langsung calon anggota dalam pengambilan keputusan. Prinsip tersebut sejalan dengan gagasan *collective action*, bahwa tindakan bersama membutuhkan pemaknaan tujuan yang dipahami bersama (*shared meaning*) dan kesempatan bagi anggota untuk menyepakati aturan yang dianggap sah oleh kelompok (Crowley & Barlow, 2022)

Rekrutmen terarah juga menjadi bagian penting dalam membangun fondasi organisasi. Kesamaan bidang usaha memungkinkan anggota memiliki kepentingan ekonomi yang beririsan, sedangkan komitmen dan kesiapan berpartisipasi menjadi pertimbangan untuk membangun tanggung jawab kolektif. Hal ini sejalan dengan kajian mengenai *collaborative entrepreneurship* yang menekankan pentingnya keterhubungan antara individu, organisasi, dan komunitas dalam menciptakan nilai bersama melalui tujuan dan tanggung jawab yang saling terkait (Hadjielias & Discua Cruz, 2024). Oleh karena itu, pembentukan KUBe tidak dipahami sekadar sebagai pembentukan struktur administratif, melainkan sebagai proses awal membangun kesepakatan, identitas, dan tanggung jawab bersama dalam pengembangan usaha kerajinan besek.

Tabel 2. Matrik Peran Angota Kelompok Usaha Bersama Besek

Tahap	Aktivitas utama	Peran masyarakat/calon anggota	Peran tim pendamping	Hasil
1. Pemetaan dan validasi	Identifikasi potensi, pengrajin, dan	Memberikan informasi dan memvalidasi	Memfasilitasi pemetaan dan dokumentasi	Data potensi dan kebutuhan pengrajin

	persoalan usaha	kondisi lapangan		
2. Pendekatan sosial	Komunikasi dengan tokoh masyarakat dan pengrajin berpengalaman	Memberikan penerimaan, masukan, dan dukungan sosial	Membangun komunikasi dan menjelaskan tujuan program	Penerimaan sosial terhadap rencana pembentukan KUBe
3. Rekrutmen dan musyawarah	Menghimpun 30 anggota, membahas identitas dan struktur kelompok	Menyatakan kesediaan, mengusulkan, berdiskusi, dan menyepakati keputusan	Memfasilitasi rekrutmen dan musyawarah	Kesepakatan keanggotaan dan struktur organisasi
4.Konsolidasi administrasi	Penyusunan AD/ART, daftar anggota, dan dokumen pengesahan	Memberikan masukan dan menyepakati aturan kelompok	Membantu penyusunan dan penataan dokumen	Dokumen kelembagaan



Gambar 3. Validasi dan observasi aktivitas pengrajin besek di tingkat rumah tangga (dokumentasi tim, 2026)



Gambar 4. Pendekatan partisipatif dan penjajakan kesiapan calon anggota (dokumentasi tim, 2026).

3. Pembentukan KUBe dan Konsolidasi Kelembagaan

Musyawarah mufakat pada tanggal 3 Agustus 2026 menjadi titik penting dalam pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) “Besek Berdaya”. Forum tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai identitas kelompok, pemilihan pengurus inti, dan pembentukan tiga divisi operasional, yaitu Divisi Produksi dan Quality Control, Divisi Pemasaran dan Kemitraan, serta Divisi Pengembangan Usaha dan Pelatihan. Kesepakatan ini menandai pergeseran dari aktivitas produksi yang sebelumnya dijalankan secara individual menuju pengorganisasian kerja melalui pembagian fungsi dan tanggung jawab. Dalam perspektif *community-based enterprise*, struktur organisasi dan kapasitas kolektif merupakan unsur penting untuk mengelola sumber daya komunitas menjadi aktivitas ekonomi yang terkoordinasi (Pradhan & Samanta, 2023)

Secara struktural, KUBe “Besek Berdaya” terdiri atas pengurus inti dan tiga divisi operasional. Pengurus inti mencakup ketua, sekretaris, dan bendahara. Ketua bertanggung jawab mengoordinasikan kegiatan kelompok, memimpin musyawarah, serta memastikan keputusan organisasi dijalankan. Sekretaris menangani administrasi, pendataan anggota, pencatatan hasil musyawarah, dan dokumentasi kegiatan. Bendahara bertanggung jawab mengelola pencatatan pemasukan dan pengeluaran serta menyampaikan laporan keuangan kepada anggota. Pembagian tugas tersebut menjadi dasar koordinasi agar pelaksanaan kegiatan tidak hanya bergantung pada satu orang atau pengurus tertentu.

Pada tingkat operasional, Divisi Produksi dan Quality Control bertugas mengoordinasikan proses pembuatan besek, menjaga konsistensi kualitas produk, serta memastikan hasil produksi memenuhi standar mutu yang disepakati kelompok. Divisi Pemasaran dan Kemitraan bertanggung jawab mengidentifikasi peluang pasar, mengelola komunikasi dengan pembeli, menjajaki kerja sama dengan mitra, dan mengoordinasikan informasi pesanan kepada anggota. Sementara itu, Divisi Pengembangan Usaha dan Pelatihan diarahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan peningkatan keterampilan, mengembangkan gagasan produk dan usaha, serta mengoordinasikan kegiatan pembelajaran atau pelatihan bagi anggota. Dengan pembagian tersebut, ketiga divisi memiliki fungsi yang saling melengkapi: menjaga kualitas dan kapasitas produksi, memperluas akses pasar, serta memperkuat kemampuan pengembangan usaha.

KUBe "*Besek Berdaya*" beranggotakan 30 orang. Untuk mengatur hubungan dan tanggung jawab antaranggota, kelompok menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Dokumen tersebut menetapkan asas kekeluargaan, gotong royong, keadilan, kebersamaan, dan kemandirian ekonomi sebagai landasan organisasi. Asas-asas tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam ketentuan mengenai keanggotaan, standar mutu produk, mekanisme pembagian kuota pesanan, sumber dan pengelolaan keuangan, masa jabatan pengurus, serta pelaksanaan musyawarah rutin.

Dalam praktik organisasi, ketentuan keanggotaan menjadi acuan mengenai hak dan kewajiban anggota serta keterlibatan mereka dalam kegiatan kelompok. Ketentuan standar mutu menjadi pedoman bagi anggota dalam menjaga keseragaman kualitas besek. Mekanisme pembagian kuota pesanan berfungsi mengatur distribusi pekerjaan agar pelaksanaan pesanan dapat dikoordinasikan secara kolektif berdasarkan aturan yang disepakati. Sementara itu, pengaturan keuangan menjadi dasar pencatatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana kelompok. Ketentuan mengenai masa jabatan pengurus dan musyawarah rutin juga menyediakan mekanisme evaluasi, pengambilan keputusan, serta pergantian kepengurusan. Dengan demikian, AD/ART tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai pedoman tata kelola yang mengatur hubungan kerja dan ekspektasi antaranggota.

Pengaturan tersebut dapat dipahami melalui konsep *institutional bricolage*, yakni proses pembentukan kelembagaan melalui penyesuaian aturan formal dengan norma, praktik, dan kepentingan aktor lokal. Dalam konteks KUBe "Besek Berdaya", asas kekeluargaan dan gotong royong menjadi landasan normatif, sedangkan ketentuan mengenai standar mutu, pembagian pesanan, dan pengelolaan keuangan menyediakan aturan operasional bagi aktivitas kelompok. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa

kelembagaan kolektif dapat tumbuh melalui proses perundingan dan penyesuaian antara aturan organisasi dengan praktik sosial .

Dari sisi administrasi, dokumen kegiatan mencatat bahwa Berita Acara Pembentukan dan Lembaran Pengesahan ditandatangani pada 5 Agustus 2026 oleh Kepala Dusun dan diketahui oleh Kepala Desa. Kedua dokumen tersebut menunjukkan adanya pengakuan administratif-sosial terhadap pembentukan kelompok pada tingkat lokal. Namun, pengakuan tersebut perlu dibedakan dari legalitas formal usaha maupun status badan hukum. Berita Acara Pembentukan mendokumentasikan proses dan hasil pembentukan kelompok, sedangkan Lembaran Pengesahan mencatat pengakuan administratif pada tingkat dusun dan desa. Keduanya tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa KUBe telah memperoleh status badan hukum atau legalitas usaha formal.

Berdasarkan dokumen yang tersedia, penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dengan nomor resmi dan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) masih menjadi agenda tindak lanjut yang perlu diverifikasi. Oleh karena itu, capaian kegiatan ini dibatasi pada terbentuknya organisasi, tersusunnya aturan internal, dan tersedianya dokumen pembentukan serta pengesahan administratif-sosial tingkat lokal. Pembedaan tersebut penting agar capaian pengorganisasian masyarakat tidak disamakan dengan penyelesaian seluruh aspek legalitas usaha. Penguatan legalitas dan administrasi tetap menjadi bagian dari agenda pengembangan kelembagaan KUBe secara bertahap (Prestianawati dkk., 2025).



Gambar 5. Musyawarah dan pengambilan keputusan pembentukan kelompok (dokumentasi tim, 2026).



Gambar 6. Forum dialog warga dan pendamping sebagai bagian dari proses deliberatif (dokumentasi tim, 2026)

4. *Output* Terverifikasi dan Batas *Outcome* Awal

Tabel 3. *Output* dan Status Capaian Pendampingan KUBe "Besek Berdaya"

Tahapan kegiatan	*Output* yang dihasilkan	Bukti pendukung	Status capaian
Pemetaan dan validasi	Tersedianya data awal mengenai keterlibatan warga dalam sektor besek serta identifikasi potensi dan persoalan lokal	Data pemetaan lapangan dan catatan observasi	*Output* kegiatan
Pendekatan tokoh dan rekrutmen	Terbangunnya akses komunikasi sosial dan teridentifikasinya calon anggota yang bersedia terlibat	Dokumentasi dialog dan daftar anggota	*Output* kegiatan
Musyawarah, 3 Agustus 2026	Kesepakatan mengenai nama kelompok, pengurus inti, dan tiga divisi operasional	Berita acara dan struktur organisasi	*Output* kelembagaan
Konsolidasi administrasi, 3–5 Agustus 2026	Tersusunnya AD/ART, daftar anggota, dan dokumen pengesahan administratif tingkat lokal	Dokumen administrasi kelompok	*Output* kelembagaan
Keberlanjutan kelompok	Penguatan tata kelola, pencatatan produksi dan keuangan, pengembangan pemasaran, serta tindak lanjut legalitas	Belum tersedia sebagai bukti capaian dalam periode pendampingan	Agenda tindak lanjut, belum menjadi *outcome* terukur

Sumber: Dokumentasi dan catatan kegiatan pendampingan, 2026.

Berdasarkan Tabel 3, capaian utama pendampingan KUBe “Besek Berdaya” berada pada tingkat *output* kelembagaan. Selama periode kegiatan, kelompok berhasil dibentuk dengan 30 anggota, memiliki struktur kepengurusan, menetapkan tiga divisi operasional, serta menyusun AD/ART dan dokumen pengesahan administratif-sosial tingkat lokal. Capaian tersebut menunjukkan tersedianya perangkat awal organisasi yang diperlukan untuk mengoordinasikan aktivitas ekonomi secara kolektif. Namun, capaian kelembagaan tersebut perlu dibedakan dari *outcome* kegiatan. Pembentukan struktur dan penyusunan aturan internal belum dengan sendirinya membuktikan bahwa koordinasi produksi telah berjalan lebih efektif, partisipasi anggota meningkat, atau komitmen kolektif telah menguat dalam praktik sehari-hari. Perubahan tersebut memerlukan pengamatan terhadap aktivitas kelompok setelah pembentukan, misalnya keteraturan pertemuan, keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan pembagian tugas, dan konsistensi menjalankan kesepakatan organisasi. Oleh karena itu, dalam periode pendampingan ini, perubahan koordinasi, partisipasi, dan komitmen lebih tepat ditempatkan sebagai dimensi *outcome* awal yang perlu diuji melalui pemantauan lanjutan, bukan sebagai dampak yang telah terbukti.

Dalam perspektif *community entrepreneurship*, keluaran kelembagaan dapat dipahami sebagai infrastruktur sosial yang memungkinkan tindakan ekonomi kolektif pada tahap berikutnya. Jaringan lokal berpotensi menyediakan kepercayaan, informasi, dan legitimasi sosial, sedangkan organisasi menyediakan mekanisme untuk mengoordinasikan sumber daya dan membagi tanggung jawab. Penelitian mengenai kewirausahaan perdesaan di Indonesia menunjukkan relevansi modal sosial dan visi bersama bagi perkembangan usaha berbasis komunitas, tetapi keberadaan organisasi tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kinerja ekonomi (Aritenang, 2021). Dengan demikian, KUBe “Besek Berdaya” lebih tepat dipahami sebagai *enabling condition*, yaitu kondisi kelembagaan awal yang membuka peluang bagi pengembangan usaha kolektif, bukan sebagai bukti bahwa tujuan ekonomi akhir telah tercapai.



Gambar 7. Dokumentasi kegiatan dan keterlibatan komunitas dalam program pendampingan (dokumentasi tim,2026).

Untuk mengetahui apakah kondisi kelembagaan tersebut berkembang menjadi manfaat ekonomi, tahap berikutnya perlu diarahkan pada pembangunan sistem pemantauan berbasis data. Pengukuran perlu dimulai dengan penyusunan data dasar (baseline) mengenai kondisi ekonomi anggota, volume produksi, harga bahan baku, harga jual, biaya produksi dan transportasi, kanal pemasaran, serta transaksi yang dilakukan secara kolektif. Data tersebut selanjutnya dapat dibandingkan secara berkala untuk menilai perubahan kinerja kelompok dan kondisi ekonomi anggota (Najamudin, A. I. A., Istain, K., Handayani, A. N., Umara, A. A., Hanifah, G. A., Mutsana, M. I., ... & Barkah, S., 2019). Melalui pendekatan longitudinal, evaluasi dapat mengidentifikasi apakah koordinasi melalui KUBe berkontribusi terhadap efisiensi biaya, peningkatan posisi tawar, perluasan pasar, atau perubahan pendapatan anggota.

Kebutuhan memperkuat jaringan pemasaran juga relevan dengan penelitian yang menekankan peran jejaring dalam inovasi dan pertumbuhan bisnis perdesaan (Johnson-Young E. A., 2019)), serta fungsi media sosial dalam mengoordinasikan tindakan dan sumber daya dalam *community entrepreneurship*. Namun, pengembangan pemasaran digital perlu didasarkan pada kesiapan organisasi, terutama ketersediaan data produk, kapasitas produksi, mekanisme pembagian pesanan, dan pencatatan transaksi. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berorientasi pada promosi, tetapi juga dapat mendukung koordinasi produksi, komunikasi dengan pelanggan, dan pengembangan kemitraan.

Tabel 4. Indikator Pemantauan Keberlanjutan KUBe "Besek Berdaya"

Dimensi	Indikator	Cara pengukuran	Sumber data
Tata kelola organisasi	Frekuensi pertemuan kelompok	Jumlah pertemuan yang terlaksana dalam satu bulan atau periode evaluasi	Notulen dan daftar hadir
Partisipasi anggota	Tingkat kehadiran dan keterlibatan anggota	Persentase anggota yang hadir serta terlibat dalam musyawarah atau kegiatan kelompok	Daftar hadir dan dokumentasi kegiatan
Koordinasi produksi	Jumlah pesanan yang dikerjakan secara kolektif	Jumlah pesanan yang dikoordinasikan melalui kelompok dalam periode tertentu	Buku pesanan dan catatan produksi
Konsistensi produksi	Kelengkapan pencatatan volume produksi	Ketersediaan catatan jumlah produk, waktu produksi, dan anggota yang terlibat	Buku produksi
Kualitas produk	Konsistensi pemenuhan standar mutu	Pemeriksaan kesesuaian produk dengan standar kualitas yang disepakati	Formulir pemeriksaan kualitas
Pemasaran dan kemitraan	Perkembangan kanal pemasaran dan mitra usaha	Jumlah kanal pemasaran aktif, mitra pembeli, dan transaksi yang dihasilkan	Catatan penjualan dan dokumen kerja sama
Pengelolaan keuangan	Konsistensi pencatatan keuangan kelompok	Kelengkapan pencatatan pemasukan, pengeluaran, dan saldo dalam periode tertentu	Buku kas dan laporan keuangan
Kinerja ekonomi anggota	Perubahan pendapatan dari usaha besek	Perbandingan pendapatan bersih anggota sebelum dan sesudah keterlibatan dalam kegiatan kelompok	Survei baseline dan survei tindak lanjut
Legalitas kelembagaan	Perkembangan pemenuhan dokumen legalitas	Status pengurusan SK Kepala Desa dan NIB berdasarkan dokumen yang diterbitkan	Dokumen pemerintah desa dan OSS

Sumber: Disusun penulis sebagai kerangka evaluasi keberlanjutan KUBe, 2026.

Secara konseptual, temuan pendampingan KUBe "Besek Berdaya" dapat dibaca melalui tiga perspektif yang saling melengkapi. Pertama, perspektif community empowerment menjelaskan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengenali persoalan, mengidentifikasi sumber daya, dan mengambil keputusan secara kolektif. Dalam kerangka *Participatory Action Research* (PAR), masyarakat tidak ditempatkan semata-mata sebagai objek pengumpulan data, tetapi dilibatkan dalam proses produksi pengetahuan dan perumusan tindakan(Hove dkk., 2023; Ku, 2022; Wiradarmo dkk., 2022). Pada kasus ini, pemetaan dan musyawarah menjadi mekanisme

untuk menghubungkan identifikasi persoalan lokal dengan penyusunan kesepakatan pembentukan kelompok.

Kedua, perspektif *social capital* membantu menjelaskan relevansi jaringan sosial, kepercayaan, dan norma kerja sama dalam proses pengorganisasian. Modal sosial dapat mendukung koordinasi ketika relasi sosial yang telah tersedia diterjemahkan ke dalam aturan dan pembagian tanggung jawab yang dapat dijalankan bersama (Aritenang, 2021; Prestianawati dkk., 2025). Dalam konteks Sumberagung Kidul, pendekatan kepada tokoh masyarakat dan proses musyawarah merupakan bagian dari upaya membangun legitimasi sosial bagi pembentukan kelompok. Akan tetapi, modal sosial tidak dapat langsung disamakan dengan keberhasilan usaha. Keberlanjutan kerja kolektif tetap bergantung pada kemampuan anggota membangun mekanisme organisasi yang konsisten.

Ketiga, perspektif community-based enterprise dan collective entrepreneurship menjelaskan pentingnya kapasitas organisasi dalam menggabungkan sumber daya dan mengembangkan nilai ekonomi secara kolektif (Pradhan & Samanta, 2023). Pembentukan tiga divisi dalam KUBe “Besek Berdaya” merupakan upaya awal untuk membangun pembagian fungsi pada bidang produksi dan pengendalian mutu, pemasaran dan kemitraan, serta pengembangan usaha dan pelatihan. Struktur tersebut menyediakan kerangka koordinasi, tetapi efektivitasnya masih memerlukan pengujian melalui praktik organisasi dan kinerja usaha pada tahap berikutnya. Dengan demikian, struktur organisasi perlu dipahami sebagai perangkat awal pengelolaan usaha kolektif, bukan sebagai indikator tunggal keberhasilan ekonomi.

Ketiga perspektif tersebut memperlihatkan bahwa kelembagaan usaha perdesaan tidak dapat dilepaskan dari keterlekatan pada tempat (place-based embeddedness), jaringan sosial, dan kemampuan menghubungkan sumber daya lokal dengan dukungan eksternal. Karena itu, agenda pengembangan KUBe tidak cukup berhenti pada penguatan tata kelola internal. Kelompok juga perlu membangun hubungan dengan pembeli, pemasok bahan baku bambu, pemerintah desa, lembaga pembiayaan, dan jaringan pemasaran. Jejaring tersebut dapat memperluas akses terhadap informasi, pengetahuan, sumber daya, dan peluang pasar yang tidak selalu tersedia di tingkat lokal

Dalam konteks digital, pemanfaatan media sosial dan perdagangan elektronik berpotensi memperluas akses pasar serta mendukung koordinasi antarpelaku usaha). Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan kesiapan kelembagaan. Pada KUBe “Besek Berdaya”, pemasaran digital akan lebih relevan apabila didukung oleh data produk, standar kualitas, kapasitas produksi, pembagian pesanan, dan pencatatan

transaksi yang memadai. Dengan demikian, teknologi digital ditempatkan sebagai instrumen penguatan rantai nilai, bukan sebagai intervensi yang berdiri sendiri.

Berdasarkan sintesis tersebut, kontribusi artikel ini terletak pada penjelasan mengenai proses pembentukan prasyarat kelembagaan bagi kewirausahaan kolektif di tingkat komunitas. Model yang diusulkan adalah model institution-first, yaitu proses yang bergerak dari pemetaan dan validasi potensi lokal, pembangunan legitimasi sosial, rekrutmen berbasis kesiapan, deliberasi pembentukan organisasi, penyusunan aturan internal, hingga agenda penguatan legalitas dan rantai nilai. Model ini menunjukkan bahwa pembentukan kelompok usaha bukan sekadar proses administratif, melainkan proses sosial yang menghubungkan sumber daya lokal, relasi komunitas, dan mekanisme organisasi. Meskipun demikian, model tersebut masih merepresentasikan mekanisme awal pembentukan kelembagaan. Pengaruhnya terhadap produktivitas, akses pasar, dan pendapatan anggota perlu diuji melalui pemantauan jangka menengah dan panjang.

Kesimpulan

Pendampingan pembentukan KUBe “Besek Berdaya” menunjukkan bahwa pengorganisasian usaha kerajinan perdesaan perlu diawali dengan pemetaan potensi, validasi kondisi lokal, dan penguatan kapasitas kolektif. Melalui rangkaian kegiatan partisipatif, pendampingan menghasilkan empat capaian utama, yaitu teridentifikasinya potensi dan persoalan lokal, terbentuknya legitimasi sosial serta rekrutmen anggota, disepakatinya pembentukan KUBe melalui musyawarah pada 3 Agustus 2026, dan tersusunnya perangkat administrasi kelompok hingga 5 Agustus 2026. Hasilnya, KUBe “Besek Berdaya” memiliki 30 anggota, struktur kepengurusan, tiga divisi operasional, serta AD/ART sebagai pedoman organisasi. Capaian ini menegaskan keberhasilan pada tahap inisiasi kelembagaan, bukan bukti peningkatan kinerja atau kesejahteraan ekonomi anggota.

Kontribusi artikel terletak pada perumusan model pendampingan institution-first berbasis *Participatory Action Research* (PAR), yang menjelaskan proses penghubungan modal sosial informal dengan struktur organisasi formal. Model ini menempatkan pemetaan dan validasi, legitimasi sosial, rekrutmen berbasis kesiapan, deliberasi kolektif, dan penyusunan aturan internal sebagai tahapan awal pembentukan kelembagaan usaha. Dengan demikian, pembentukan KUBe tidak dipahami semata-mata sebagai pendirian kelompok secara administratif, melainkan sebagai proses membangun dasar koordinasi dan tindakan ekonomi kolektif. Model ini berpotensi menjadi rujukan bagi pendampingan komunitas kerajinan perdesaan lain, sepanjang penerapannya disesuaikan dengan karakteristik masyarakat, potensi lokal, dan pola relasi sosial setempat.

Keberlanjutan KUBe “Besek Berdaya” bergantung pada kemampuan kelompok menerjemahkan struktur dan aturan yang telah dibentuk ke dalam praktik organisasi dan kegiatan usaha secara konsisten. Oleh karena itu, keberhasilan tahap inisiasi ini perlu ditindaklanjuti melalui penguatan tata kelola, pengembangan jaringan pemasaran, dan pemantauan kinerja produksi serta ekonomi anggota. Dengan pemantauan berkala, kontribusi kelembagaan KUBe terhadap koordinasi usaha, akses pasar, dan pendapatan anggota dapat dievaluasi secara empiris dalam jangka menengah dan panjang.

Saran

Untuk menyempurnakan kualitas akademik dan keabsahan luaran program, penelitian ini menyarankan beberapa langkah strategis sebelum publikasi final dilakukan. Pertama, verifikasi administratif terhadap status SK Kepala Desa dan NIB atas nama KUBe perlu dituntaskan guna memastikan legalitas formal instrumen pemberdayaan. Kedua, penelitian lanjutan berbasis data longitudinal—seperti dinamika omzet, pendapatan, volume produksi, Fluktuasi harga bahan baku, hingga jangkauan pasar—sangat direkomendasikan agar klaim dampak peningkatan ekonomi dapat diukur secara presisi. Selain itu, penulis perlu menyelaraskan dokumentasi visual sesuai ketentuan jurnal sasaran dengan melengkapi metadata foto berupa tanggal, lokasi, dan identitas dokumentasi. Terakhir, verifikasi ulang atas ejaan nama ketua kelompok berdasarkan dokumen identitas resmi penting dilaksanakan sebelum metadata naskah dikunci untuk menghindari ketidaksesuaian data administratif.

DAFTAR PUSTAKA

Aritenang, A. (2021). The Role of Social Capital on Rural Enterprises Economic Performance: A Case Study in Indonesia Villages. *Sage Open*, *11*(3), 21582440211044178. https://doi.org/10.1177/21582440211044178

Crowley, F., & Barlow, P. (2022). Entrepreneurship and social capital: A multi-level analysis. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, *28*(9), 492–519.

Effendi, H., Nurhaida, D., & Haryadi, E. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Melalui Pelatihan Anyaman Bambu dan Pemasaran Digital untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan. *Jurnal IPTEK Bagi Masyarakat*, *4*(3), 268–283.

Hadjielias, E., & Discua Cruz, A. (2024). Sustainable entrepreneurial behaviours of family members at the intersection of family firm, cooperative and rural community: A multilevel perspective. *Entrepreneurship & Regional Development*, 1–30. https://doi.org/10.1080/08985626.2024.2376068

Hove, J., Mabetha, D., van der Merwe, M., Twine, R., Kahn, K., Witter, S., & D’Ambruoso, L. (2023). Participatory action research to address lack of safe water, a community-nominated health priority in rural South Africa. *PLoS One*, *18*(7), e0288524.

Johnson-Young E. A. (2019). Predicting Intentions to Breastfeed for Three Months, Six Months, and One Year Using the Theory of Planned Behavior and Body Satisfaction. *Health communication, 34(7), 789–800.* https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1437523

Khaerul, K. U., Asisah, N., Muttaqin, Z., Anam, M. M., & Aziza, R. R. (2022). Peningkatan kualitas taman pendidikan Al-Qur'an (TPQ) melalui metode participatory action research (PAR). *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, *5*(4), 411–416.

Ku, H. B. (2022). From action to theory building: An action research of rural social work practice in China. *China Journal of Social Work*, *15*(3), 233–249. https://doi.org/10.1080/17525098.2022.2107148

Liu, J., Zhong, D., Liu, J., & Liao, Z. (2023). B&B accommodation entrepreneurship in rural China: How does embeddedness make a difference? *Journal of Hospitality and Tourism Management*, *56*, 284–294.

Muttaqin, Z., Rusli, A. R., & Supriyanto, B. (2023). The potential of bamboo and the contribution of bamboo craftsmen to the community's income in Cibadak Village, Bogor City, Indonesia. *Biodiversitas: Journal of Biological Diversity*, *24*(10), 5796.

Najamudin, A. I. A., Istain, K., Handayani, A. N., Umara, A. A., Hanifah, G. A., Mutsana, M. I., ... & Barkah, S. (2019). *Pelatihan Kepemudaan Pemuda-Mudi Dusun Cetok sebagai Upaya Optimalisasi Peran Pemuda dalam Mengembangkan Potensi Desa.*

Pradhan, S., & Samanta, S. (2023). Global research on community-based enterprise: A bibliometric portrait. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, *17*(4), 793–814.

Pramesti, D. A., Khoiriyah, L., Antono, D. T., Asmoro, D., Pratiwi, O. A., & Valdanu, M. (2022). Digital marketing for optimizing the bamboo handicrafts marketing in IKM" Mandiri Bambu Craft'. *Community Empowerment*, *7*(1), 28–32.

Prestianawati, S. A., Syafitri, W., Tamin, A. K. A., & Fawwaz, M. (2025). Pemberdayaan UMKM untuk keberlanjutan usaha melalui penguatan manajemen keuangan, operasional, dan legalitas (NIB). *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, *6*(2), 339–347.

Putri, S. S., Purba, N. F., Tiffani, T. D., Siregar, A. J., & Iqbal Abdul Muin, M. (2026). Integrating Education, Research, and Service: A Participatory Action Research (PAR) Model for University-Led Community Empowerment in Rural Indonesia. *PPSDP International Journal of Education*, *5*(1), 252–265.

RI, D. (2022). *Metodologi pengabdian masyarakat*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal …. https://kkn.stainkepri.ac.id/storage/files/downloads/9nUGmKZSYyk40ltORZ5Ld6Tekdnbkjwopnps Mheo.pdf

Sosmiarti, S., Sadjiana, F. A., Syaiful, F. L., Nur, Y. S., & Putra, A. E. (2026). P PENGUATAN PERAN BUMNAG SEBAGAI UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN NAGARI DAN MASYARAKAT SAKO PASIA TALANG KECAMATAN SUNGAI PAGU KABUPATEN SOLOK SELATAN: Participatory Institutional Strengthening of Village-Owned Enterprises to Promote Community Economic Development. *Buletin Ilmiah Nagari Membangun*, *9*(2), 96–113.

Wiradarmo, A. A., Andani, D., Danta, I. K., Gaol, C. P. L., Putra, B. S. D., & Gunawan, A. J. (2022). Desain dan pelatihan produk bambu untuk pemberdayaan kampung kreatif sekebuluh. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(2), 130–143.